

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, UMKM umumnya memiliki jumlah yang sangat besar. Di wilayah Jakarta Timur saja, jumlah UMKM yang terdaftar mencapai 240.512 unit. Pada tahun 2021 tercatat 62.108 unit usaha, sementara pada tahun 2022 jumlahnya menurun menjadi 55.163 unit (Timur, 2024). Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.



Program KUR menyasar pelaku UMKM yang layak secara bisnis (feasible) namun belum memenuhi persyaratan formal perbankan (non-bankable) seperti keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya pencatatan administrasi. Kondisi ini mengakibatkan banyak UMKM bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang justru berpotensi menjerat mereka pada masalah finansial baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007, yang ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan

berkontribusi terhadap perekonomian. Lalu adanya peraturan baru terkait program KUR yang relevan saat ini adalah Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang diterbitkan pada tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, dan penyaluran KUR, termasuk ketentuan bagi Penyalur KUR dan Penjamin KUR. Peraturan ini menetapkan bahwa program KUR masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar kredit yang akan dihapuskan, seperti yang ditegaskan oleh pemerintah.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Yang bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia (Aristanto, 2019). Mengikuti perkembangan zaman program KUR mengalami perubahan dalam hal skema pemberian subsidi. Pada awal pelaksanaannya, subsidi dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan melalui mekanisme Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yaitu kompensasi yang diberikan kepada lembaga penjamin sebagai bentuk penghargaan atas jaminan yang mereka berikan terhadap kredit atau pembiayaan kepada pelaku UMKM oleh bank pelaksana KUR. Namun, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menunjukkan bahwa pendekatan ini kurang mampu mencapai tujuan yang diharapkan (Permana dkk., 2022). Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, sejak Agustus 2015, skema penyaluran subsidi KUR diubah menjadi subsidi bunga atau margin. Skema subsidi bunga berarti pemerintah menanggung selisih antara suku bunga yang dibayar oleh debitur dan suku bunga yang diterima oleh pihak penyalur kredit. Sementara itu, dalam pembiayaan berbasis syariah, subsidi margin mengacu pada selisih antara margin yang dibayarkan oleh debitur dengan margin yang diterima oleh lembaga penyalur, yang juga ditanggung oleh pemerintah.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu lembaga keuangan yang mendapat mandat sebagai penyalur utama KUR. Sebagai bank dengan jaringan terluas dan basis nasabah UMKM terbesar di Indonesia, BRI memegang peran

penting dalam keberhasilan implementasi program ini. Hingga Mei 2024, BRI telah menyalurkan dana KUR sebesar Rp76,4 triliun kepada sekitar 1,5 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Khusus di wilayah Jakarta Timur penyaluran KUR bersifat aktif senilai Rp 1.261,85 T per 2025. Sesuai dengan presentase pencapaian penyaluran dari pemerintah pusat yakni 100%, pada Bank BRI Cabang Cilangkap ini sudah memenuhi hingga 80%, pada presentase tersebut 80% ini ialah jumlah UMKM yang ingin berkontribusi pada Program Kredit Usaha Rakyat.

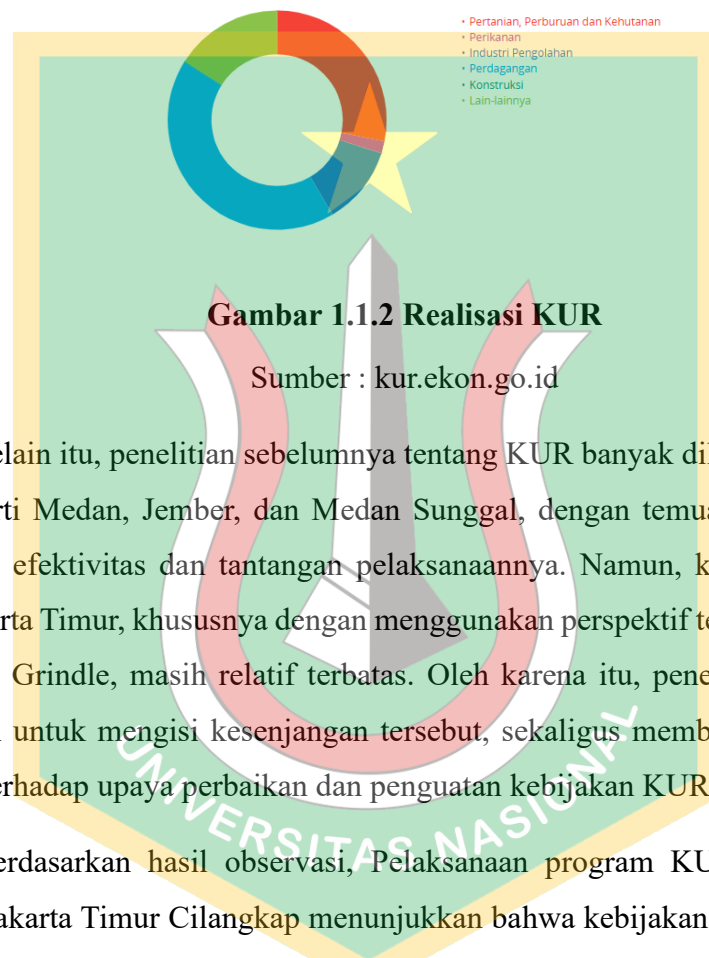
Penyaluran KUR menunjukkan tren yang cukup positif, namun tetap menghadapi sejumlah hambatan. Namun di samping itu ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan program KUR masih ditemukan pada beberapa aspek teknis dan administratif, antara lain proses pengajuan yang masih dirasa rumit bagi sebagian pelaku usaha mikro, seperti syarat dokumen legalitas, laporan keuangan, serta keterbatasan tenaga survei. Selain itu, setelah pencairan dana, masih terdapat kendala komunikasi dan informasi lanjutan bagi nasabah, terutama karena minimnya pendampingan atau pergantian petugas. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BRI Cabang Cilangkap telah menerapkan berbagai solusi, seperti sosialisasi langsung ke sentra usaha, penyederhanaan proses administrasi, pendekatan jemput bola, serta pendampingan dan monitoring pasca pencairan. Solusi-solusi ini menunjukkan komitmen BRI dalam memastikan program KUR tidak hanya tersalurkan, tetapi juga berdampak positif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Fakta tersebut menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi implementasi program KUR, khususnya pada BRI Cabang Cilangkap di Jakarta Timur. Hal ini menjadi relevan mengingat bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Merilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks pelaksanaan). Dengan menggunakan teori ini, penelitian mengenai implementasi KUR dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah melalui BRI mampu mencapai tujuan pemberdayaan UMKM.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemilihan topik ini didasarkan pada situasi yang terjadi di wilayah Jakarta Timur.

Realisasi KUR Menurut Sektor Ekonomi

Plafon (%)



Gambar 1.1.2 Realisasi KUR

Sumber : kur.ekon.go.id

Selain itu, penelitian sebelumnya tentang KUR banyak dilakukan di daerah lain seperti Medan, Jember, dan Medan Sunggal, dengan temuan yang beragam mengenai efektivitas dan tantangan pelaksanaannya. Namun, kajian yang fokus pada Jakarta Timur, khususnya dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Grindle, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi empiris terhadap upaya perbaikan dan penguatan kebijakan KUR di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil observasi, Pelaksanaan program KUR di Bank BRI Cabang Jakarta Timur Cilangkap menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan secara selektif namun inklusif, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan usaha, legalitas dasar, dan kemampuan bayar pelaku UMKM. Respon masyarakat terhadap program ini pada umumnya sangat positif, pelayanan yang diberikan oleh petugas BRI kepada nasabah UMKM umumnya dirasakan ramah, komunikatif, dan membantu, baik saat pengajuan, pencairan, maupun pendampingan penggunaan dana. Skema bunga dan sistem angsuran KUR yang rendah serta fleksibel dinilai tidak memberatkan, bahkan membantu pelaku usaha untuk berkembang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight yang berharga bagi pemerintah, lembaga keuangan penyalur KUR, serta para pelaku UMKM itu sendiri. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan program, mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam implementasinya di tingkat lokal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif guna memberdayakan UMKM di Jakarta Timur melalui skema pembiayaan KUR. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga nilai praktis yang tinggi. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, BRI sebagai pelaksana, serta bagi pelaku UMKM sebagai penerima manfaat, sehingga program KUR benar-benar mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jakarta Timur.



1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “Bagaimana implementasi program kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia di Jakarta Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menelaah pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia di wilayah Jakarta Timur..

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan atau konsep yang digunakan, serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengangkat topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah (Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Jakarta Timur, serta Pemerintah Pusat): Hasil penelitian dapat memberikan data dan analisis yang akurat mengenai sejauh mana Program KUR telah mencapai tujuannya dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Jakarta Timur. Informasi ini penting untuk implementasi kebijakan yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.
- Bagi Masyarakat UMKM di Jakarta Timur: Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat UMKM di Jakarta Timur mengenai mengenai proses dan peluang dalam Program KUR.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman sekaligus memberikan gambaran mengenai isi dan arah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini ke dalam tiga bab utama, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang masalah, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab pertama ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari seminar proposal yang disusun.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis mengulas berbagai teori dan konsep yang diambil dari sejumlah literatur yang relevan, yang digunakan sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjabaran mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode untuk menguji keabsahan data, serta langkah-langkah analisis data melalui proses pengelolaan dan penafsiran informasi.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman hasil penelitian serta rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan disusun dengan merangkum permasalahan yang telah dibahas dan hasil penyelesaiannya secara objektif melalui analisis. Adapun bagian saran berisi usulan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang teridentifikasi, yang tetap difokuskan pada lingkup penelitian ini.